



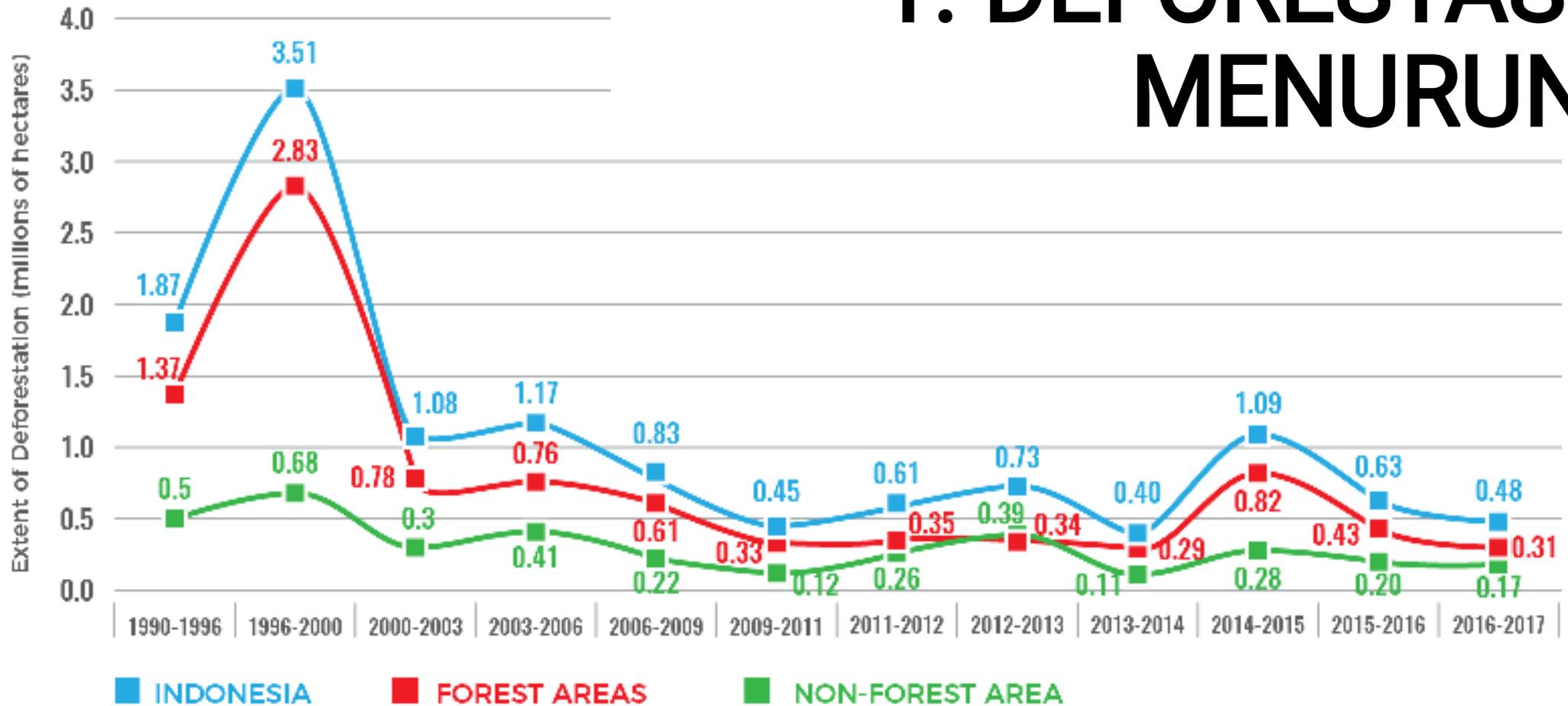
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Peningkatan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Tata Kelola Pemerintahan

**4 TAHUN PEMERINTAHAN
JOKO WIDODO-JUSUF KALLA**

JAKARTA, 25 OKTOBER 2018

1. DEFORESTASI MENURUN



LAJU DEFORESTASI INDONESIA SEMAKIN DAPAT DIKENDALIKAN.

Catatan : angka tahun 2014-2015 laju deforestasi indonesia sebesar 1,09 juta ha disumbang kebakaran hutan dan lahan

2

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2018



KOMITMEN BAPAK PRESIDEN JOKOWI

“Penegakan hukum harus betul-betul dilakukan, baik administrasi, perdata atau pidana...Ini harus dilakukan agar menciptakan sebuah kepastian hukum dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.”

Presiden Joko Widodo, Ratas Karhutla (12 August 2016)



Pengamanan Sumber Daya Alam merupakan prioritas Pemerintah Jokowi-JK mempunyai keberpihakan dan komitmen yang jelas terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dengan membentuk **unit kerja khusus** yaitu **Direktorat Jenderal Penegakan hukum**. Unit kerja spesialis ini lebih efektif karena dapat lebih fokus memastikan negara hadir dan memastikan keadilan hukum untuk rakyat

1. INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM



Pemerintah secara konsisten menerapkan **Instrumen Penegakan Hukum Holistik** yaitu instrumen Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Pidana. Mandat penerapan ketiga instrument tersebut didasari 7 UU yang menjadi mandat KLHK, yaitu :

1. UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistemnya
2. UU No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
3. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU No 18 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
6. UU No 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
7. UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. HASIL KERJA KONSISTEN PENEGAKAN HUKUM LHK TAHUN 2015-2018

Komitmen Pemerintahan Jokowi terefleksikan jelas dalam penegakan hukum LHK yang secara intensif telah dilakukan oleh Pemerintah melalui KLHK, dimana dalam 4 tahun ini lebih hampir 550 kasus dibawa ke pengadilan baik melalui penegakan hukum pidana maupun perdata. 500 perusahaan dikenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan, bahkan ada yang dicabut izinnya

Untuk pengamanan kawasan hutan dan sumberdaya kehutanan lebih dari 713 operasi pengamanan dilakukan dengan melibatkan KLHK, Kepolisian dan TNI. Langkah bersama yang dilakukan menunjukkan bahwa komitmen penyelamatan lingkungan dan sumberdaya alam telah menjadi komitmen bersama kementerian dan Lembaga.

3. HASIL KERJA PENEGAKAN HUKUM LHK TAHUN



PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF

2.688
Penanganan Pengaduan

2.429
Pengawasan Izin

523
Sanksi Administratif



PERDATA

123
Kesepakatan

Total Putusan Pengadilan Incracht untuk Ganti Kerugian dan Pemulihan

Nilai Pengganti Kerugian dan Pemulihan di Luar Pengadilan

18 Gugatan

Rp 18,1 Triliun

Rp 57,3 Miliar



PIDANA



533
P21



148
Fasilitasi Polri



PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

210
Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

265
Operasi Perambahan Kawasan Hutan

241
Operasi Pembalakan Liar / Hasil Hutan

Kawasan hutan yang berhasil diamankan melalui berbagai operasi 8.294.968 hektar

A. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Jumlah sanksi administrasi yang diberikan KLHK

No	Jenis Sanksi	2015	2016	2017	2018*	Jumlah
1	Pencabutan Izin	3	-	1	0	4
2	Pembekuan Izin	21	0	0	0	21
3	Paksaan Pemerintah	16	90	125	129	360
4	Teguran Tertulis	8	15	0	0	23
5	Surat Peringatan	0	115	0	0	115
TOTAL		48	220	126	129	523

)* per tanggal 15 Oktober 2018



B. SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN / HUKUM PERDATA

Status Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Tahun 2015-2018

Status	Karhutla	Kerusakan Lingkungan	Pencemaran	TOTAL
Inkracht	5	1	0	6
Putusan	6	0	0	6
Proses Penyusunan Guatan	1	2	3	6
TOTAL	12	3	3	18

Total ganti rugi Melalui Pengadilan (2015 – 2018) : Rp. 18.329.414.348.700

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan

TAHUN	2015	2016	2017	2018	TOTAL
JUMLAH PERUSAHAAN	25	40	39	19	123

Total ganti rugi di Luar Pengadilan tahun 2015 – 2018: Rp. 57.319.789.400

C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Jumlah hasil penegakan hukum s.d P21 tahun 2015-2018

NO	TIPOLOGI KASUS	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1	Pembalakan Liar	43	66	66	79	254
2	Perambahan	28	29	8	20	85
3	Peredaran Illegal TSL	43	51	55	26	175
4	Pencemaran Lingkungan	4	3	4	2	13
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1	1	1	3
TOTAL		118	150	134	128	530

Jumlah hasil fasilitasi POLRI dan Kejaksaan

NO	TIPOLOGI KASUS	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1	Pembalakan Liar	6	0	0	0	6
2	Perambahan	2	7	1	0	10
3	Peredaran Illegal TSL	0	0	0	0	0
4	Pencemaran Lingkungan	8	12	18	20	58
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	32	26	9	4	71
6	Kerusakan Lingkungan	0	0	6	0	6
TOTAL		48	45	34	24	151

4. HASIL KERJA PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMERANGI KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Negara Hadir untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan kehutanan yang mengganggu rasa keadilan rakyat, perekonomian negara dan kesehatan masyarakat. Terdapat setidaknya 7 tipologi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi prioritas Pemerintah Jokowi, yaitu :

1. Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Pencemaran Lingkungan
3. *Illegal Logging*
4. Perambahan Kawasan Hutan untuk Pertambangan dan Perkebunan
5. Perburuan dan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Perusakan Lingkungan
7. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah Berbahaya Beracun

A. CAPAIAN GAKKUM 2015 s.d 31 AGUSTUS 2018



KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

335 Pengawasan Izin dari 116 Perusahaan
56 Sanksi Administrasi 115 Teguran tertulis
12 Gugatan
71 Fasilitasi Kejaksaan (Pidana)
3 Pidana (P-21), 9 Proses Pidana



KERUSAKAN LINGKUNGAN

380 Pengawasan Izin dari 73 Perusahaan
23 Sanksi Administratif,
3 Gugatan, 14 Kesepakatan di Luar Pengadilan
24 Pidana (P-21) Pidana Pertambangan, 21 Proses Pidana,
15 Operasi Pertambangan



PENCEMARAN LINGKUNGAN

1.379 Pengawasan Izin dari 686 Perusahaan
251 Sanksi Administratif
3 Gugatan Melalui Pengadilan
13 Pidana (P-21), 5 Proses Pidana
55 Fasilitasi POLRI dan Kejaksaan

B. CAPAIAN GAKKUM 2015 s.d 16 OKTOBER 2018



ILLEGAL LOGGING

241 Operasi
254 Pidana (P.21)
52 Proses Pidana
Mengamankan: 11.012,
21 M3 Kayu



TUMBUHAN SATWA LIAR DILINDUNGI

210 Operasi 175 Pidana
(P-21),
13 Proses Pidana
Mengamankan:
213,976 Ekor
10.363 Bagian Tubuh



PERAMBAHAN HUTAN

265 Operasi
8.294.967,78 Ha
Diamankan
85 Pidana (P-21)
8 Proses Pidana

3

MENANGANI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



UPAYA-UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2018



**KOORDINASI PENGENDALIAN
KARHUTLA MELALUI RAPAT KOORDINASI
DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH**



**PENGUATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA PENGENDALIAN
KARHUTLA**



**REVITALISASI DAN PENGUATAN SARANA
PRASARANA PENGENDALIAN KARHUTLA**



**PENGEMBANGAN EARLY WARNING
SYSTEM , EARLY DETECTION SYSTEM
DAN GROUNDHECK HOTSPOT**



**PELAKSANAAN PATROLI TERPADU
PENCEGAHAN KARHUTLA**



**PENANGGULANGAN KARHUTLA
MELALUI PEMADAMAN DARAT**



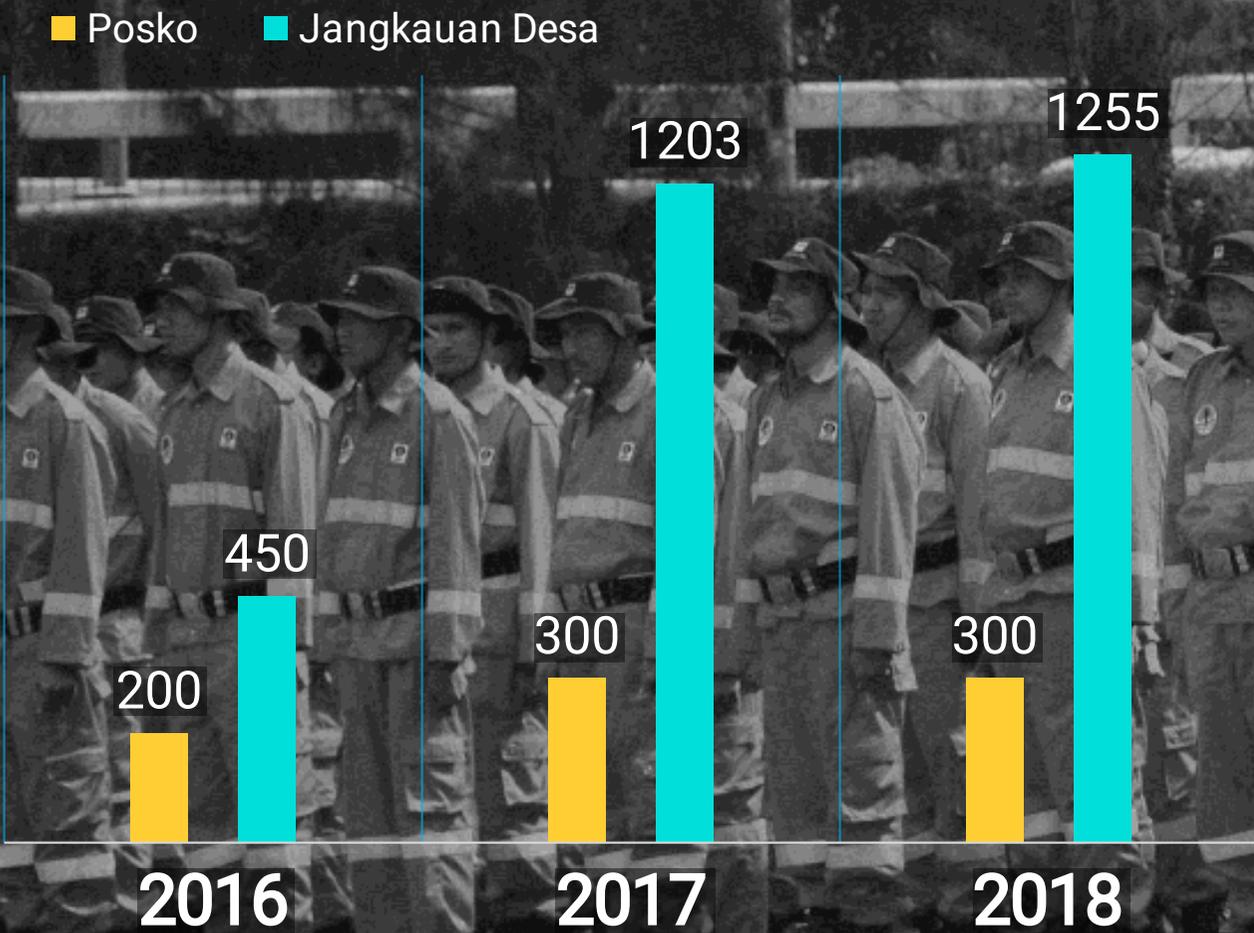
**KAMPANYE PENYADARTAHUAN
PENCEGAHAN KARHUTLA**



**PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PENGOLAHAN LAHAN TANPA BAKAR
(PLTB)**



**DUKUNGAN OPERASI UDARA
DALAM PENGENDALIAN
KARHUTLA**



Jumlah desa jangkauan terus ditingkatkan untuk memperluas deteksi dini, respon cepat dan peningkatan kepedulian. Secara paralel, kapasitas masyarakat juga ditingkatkan dengan mendorong pengolahan lahan tanpa bakar.

PATROLI TERPADU

72 kabupaten, 349 kecamatan, 1.255 desa dari 8 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Sebaran desa disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang datanya dipantau dari citra satelit. Waktu pelaksanaan patroli disesuaikan dengan analisis bersama Badan Meteorologi dan Geofisika.

No	Provinsi	2016		2017		2018	
		Posko	Jangkauan	Posko	Jangkauan	Posko	Jangkauan
1	Sumatera Utara	-	-	15	45	15	59
2	Riau	40	80	65	189	65	244
3	Jambi	20	30	20	88	30	221
4	Sumatera Selatan	30	38	50	447	50	177
5	Kalimantan Barat	35	135	60	167	60	189
6	Kalimantan Tengah	40	69	55	110	45	208
7	Kalimantan Selatan	15	29	20	67	20	101
8	Kalimantan Timur	20	69	15	90	15	56
	Jumlah	200	450	300	1203	300	1255

WAKTU PATROLI TERPADU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2018

NO	PROVINSI	JUMLAH POSKO	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Sumatera Utara	15																													4 Sept-3 Okt			
																															45 desa			
2	Riau	65									2-31 Mei								2-31 Juli				2-31 Agustus											
											244 Desa								244 Desa				244 Desa											
3	Jambi	30																					10 ags-8 sept											
																							120 Desa											
4	Sumatera Selatan	50									2-31 Mei								2-31 Juli				2-31 Agustus											
											177 Desa								177 Desa				177 Desa											
5	Kalimantan Barat	60	1-30 Maret								2-31 Mei												10 ags-8 sept											
			189 Desa								189 Desa												189 Desa											
6	Kalimantan Tengah	45																	2-31 Juli				10 ags-8 sept											
																			208 Desa				208 Desa											
7	Kalimantan Selatan	20																	2-31 Juli															
																			101 Desa															
8	Kalimantan Timur	15																					10 ags-8 sept											
																							56 Desa											
	JUMLAH	300																																

OPERASI PEMADAMAN

Operasi Pemadaman Darat

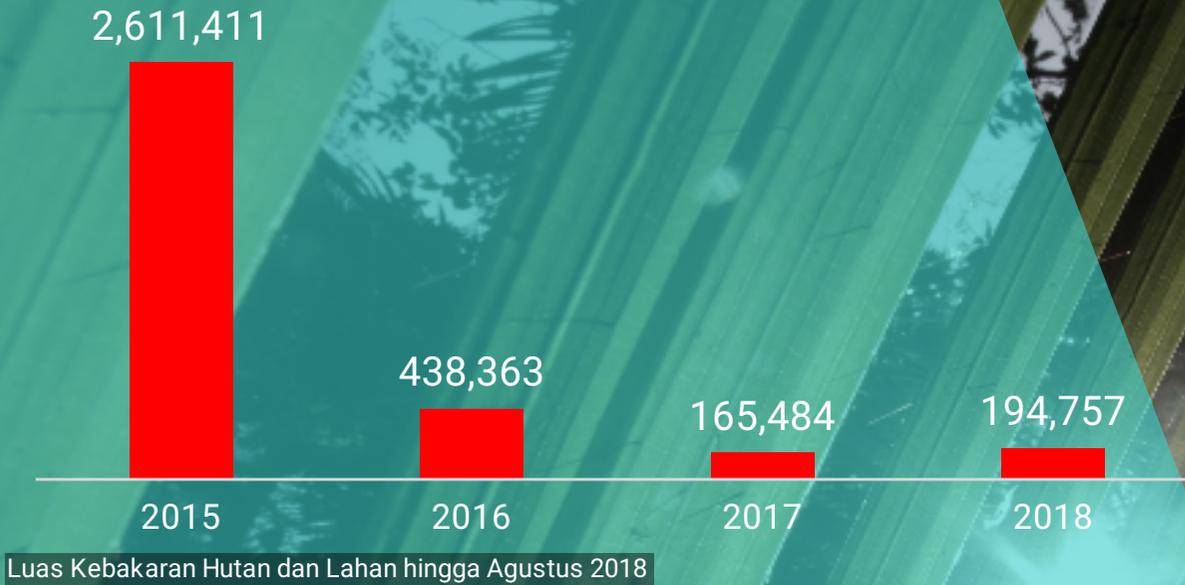
- Pemadaman darat → Manggala Agni dan atau bersama dengan para pihak terkait secara terpadu.
- Umumnya operasi pemadaman dibawah kendali Satgas Pemadaman Darat.
- Para pihak yang mendukung upaya pemadaman darat ini meliputi : Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB/BPBD, perusahaan konsesi kehutanan atau perkebunan, dan masyarakat peduli api.

Operasi udara (water bombing dan hujan buatan)

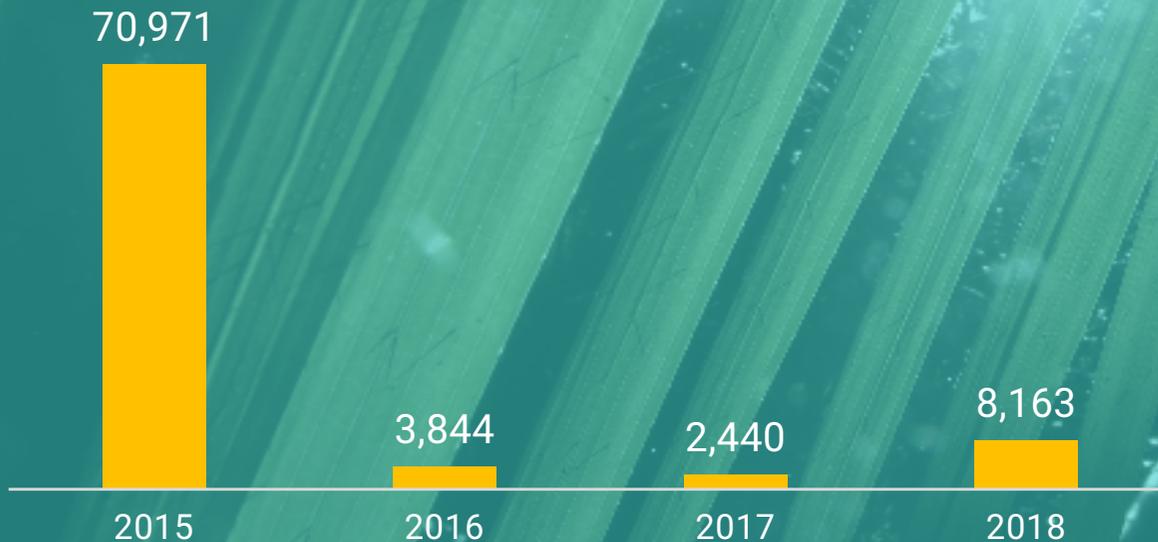
KEGIATAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018*)
Operasi Heli/Pesawat	Unit	32	16	19	59
Jumlah Air (Water Bombing)	Liter	150.610	100.123	48.223.800	289.770.200
Jumlah Garam (Modifikasi Cuaca)	Ton	261	128	105	175

*) S/d 10 Oktober 2018

LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2015-2018 (HA)



JUMLAH TITIK PANAS 2015-2018



Luas Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Satelit Terra Aqua Nasa pada confident level > 80% hingga 11 Oktober 2018

Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun 92,5%, sedangkan jumlah titik panas menurun 88,5%.

Luas areal kebakaran justru lebih banyak di luar Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hingga awal tahun depan, wilayah Jawa bagian selatan hingga Nusa Tenggara, dikuti Maluku dan Papua akan terus mengalami kekeringan.

LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2018 DI SETIAP PROVINSI

No.	Provinsi	Luas Kebakara Hutan dan Lahan (Ha)		
		Mineral	Gambut	Jumlah
SUMATERA				
1	Aceh	836	448	1.285
2	Jambi	338	622	960
3	Bangka Belitung	1.076	90	1.166
4	Kep. Riau	321	-	321
5	Lampung	5.886	-	5.886
6	Riau	1.439	28.927	30.366
7	Sumatera Barat	708	1.461	2.169
8	Sumatera Selatan	1.627	613	2.240
9	Sumatera Utara	1.520	2.061	3.582
TOTAL		13.752	34.223	47.975
KALIMANTAN				
10	Kalimantan Barat	27.006	37.546	64.552
11	Kalimantan Selatan	7.328	253	7.582
12	Kalimantan Tengah	3.370	5.330	8.699
13	Kalimantan Timur	940	-	940
14	Kalimantan Utara	206	-	206
TOTAL		38.850	43.128	81.978
JAWA-BALIHUSRA				
15	Bali	83	-	83
16	Jawa Barat	2.687	-	2.687
17	Jawa Tengah	164	-	164
18	Jawa Timur	2.132	-	2.132

No.	Provinsi	Luas Kebakara Hutan dan Lahan (Ha)		
		Mineral	Gambut	Jumlah
19	Nusa Tenggara Barat	2.667	-	2.667
20	Nusa Tenggara Timur	42.356	-	42.356
TOTAL		50.089		50.089
SULAWESI				
21	Gorontalo	159	-	159
22	Sulawesi Barat	356	-	356
23	Sulawesi Selatan	151	-	151
24	Sulawesi Tengah	278	-	278
25	Sulawesi Tenggara	3.564	-	3.564
26	Sulawesi Utara	116	-	116
TOTAL		4.623		4.623
MALUKU-PAPUA				
27	Maluku	2.251	-	2.251
28	Maluku Utara	29	-	29
29	Papua	7.775	-	7.775
30	Papua Barat	18	19	37
TOTAL		10.073	19	10.092

LUASAN KEBAKARAN DI PULAU JAWA

No	Lokasi	Kegiatan Pemadaman yang dilakukan	Dukungan Instansi Lain
1	Jawa Barat • TN Gunung Ciremai (Luas dipadamkan: 143,02 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemadaman darat yang dilakukan oleh petugas TN Gunung Ciremai, TNI, Polri, MPA, Komunitas Pecinta Alam, BPBD Kuningan. • Pemadaman udara dengan water boombing menggunakan heli MI 8 (BNPB). 	Bantuan Heli MI 8 dari BNPB untuk water boombing sejak tanggal 12 – 15 Oktober 2018, sebanyak 276.000 Liter air dan bantuan personil pemadaman darat dari TNI, Polri, MPA, Masyarakat, Komunitas Pecinta Alam dan BPBD Kuningan.
2	Jawa Tengah • TN Merbabu (Luas dipadamkan: 400 Ha) (Sedang dalam proses pemadaman)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemadaman darat oleh petugas TN Gunung Merbabu, TNI, Polri, MPA, Komunitas Pecinta Alam dan BPBD Semarang. • Pemadaman udara dengan water boombing menggunakan heli MI 8 (BNPB). 	Bantuan Heli MI 8 dari BNPB untuk water boombing sejak tanggal 16 – 19 Oktober 2018, sebanyak 36.000 Liter air dan bantuan personil pemadaman darat dari TNI, Polri, MPA, Masyarakat, Komunitas Pecinta Alam. BPBD Semarang.
3	Jawa Timur • TN Bromo Tengger Semeru (Luas dipadamkan: 156,40 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemadaman darat oleh petugas TN Bromo Tengger Semeru, TNI, Polri, MPA, Masyarakat dan Komunitas Pecinta Alam. 	Bantuan personil pemadaman darat dari TNI, Polri dan Komunitas Pecinta Alam.

Data Pemadaman kebakaran berdasarkan laporan posko Karhutla-21 Oktober 2018

-

PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA

Sanksi administrasi 56 perusahaan dan 115 teguran tertulis, upaya pidana terhadap 82 kasus, perdata terhadap 11 perusahaan

No	Jenis Sanksi	Jumlah Sanksi				Total
		2015	2016	2017	2018	
SANKSI ADMINISTRASI		27	130	9	5	171
1	Pembekuan izin	16	-	-	-	16
2	Pencabutan izin	3	-	-	-	3
3	Paksaan Pemerintah	8	15	9	5	37
4	Teguran Tertulis	-	115	-	-	115
PENEGAKAN HUKUM PIDANA (LHK)		1	3	1	6	11
1	P21	-	1	1	1	3
2	Penyidikan	1	2	-	-	3
3	Pulbaket	-	-	-	5	5
PENEGAKAN HUKUM PIDANA (POLRI/KEJAKSAAN)		32	26	9	4	71
1	Sidang	-	3	2	1	6
2	P.21	8	1	-	-	9
3	P.19	-	5	-	-	5
4	Penyidikan	16	17	7	3	43
5	SP3	8	-	-	-	8
PENEGAKAN HUKUM PERDATA						11
1	Incracht					3
2	Putusan PN/PT					7
3	Penyusunan Gugatan					1